



Inovasi Layanan BUMDes untuk Mempercepat Proses Sertifikasi Halal UMKM Desa Taman

Musthafa Syukur¹, Muhammad Gufran Riyanto², Muhammad Angga Pramoedita³

^{1,2} Universitas Nurul Jadid, Indonesia

{msuthafa@unuja.ac.id¹, pandanisme12@gmail.com², ikhsanintizam@gmail.com³}

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article history Submit 18 November 2025 Revised 05 Desember 2025 Accepted 08 Desember 2025</p>	<p><i>The acceleration of halal certification has become an urgent need for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), especially amid increasing public awareness of the importance of halal assurance in food and beverage products. MSMEs in Taman Village possess strong economic potential but still face various obstacles in the certification process, including limited access to information, inadequate technical assistance, and administrative barriers. This community engagement program aims to optimize the role of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) as a facilitator to accelerate the halal certification process for MSMEs. This study employs the Participatory Action Research (PAR) method, which actively involves MSME actors, BUMDes managers, and village authorities throughout the stages of problem identification, action planning, implementation, and reflection. Data were collected through participatory discussions, in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that BUMDes holds a strategic position in providing information services, technical support, and administrative guidance, thereby reducing both the time and cost required for halal certification. Through PAR, a more effective and sustainable collaboration model was established among BUMDes, local government, and MSMEs. The study concludes that strengthening BUMDes' institutional capacity and regulatory support is essential for building a participatory halal ecosystem that is responsive to the needs of MSMEs.</i></p>
<p>Keywords: BUMDes; Halal Certification; PAR; MSMEs;</p>	<p>ABSTRAK</p> <p><i>Percepatan pengajuan sertifikasi halal merupakan kebutuhan mendesak bagi UMKM, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan kehalalan produk. UMKM di Desa Taman memiliki potensi besar dalam sektor makanan, minuman, dan kerajinan, namun masih menghadapi kendala terkait akses informasi, pendampingan teknis, dan hambatan administratif. Pengabdian ini bertujuan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai fasilitator dalam mempercepat pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM. Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), yang menempatkan pelaku UMKM, BUMDes, dan pemerintah desa sebagai subjek aktif dalam seluruh proses mulai</i></p>

dari identifikasi masalah, perencanaan tindakan, implementasi, hingga refleksi. Data dikumpulkan melalui diskusi partisipatif, wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa BUMDes memiliki posisi strategis dalam menyediakan informasi, bimbingan teknis, serta pendampingan administratif, sehingga mampu mempercepat proses sertifikasi halal dan mengurangi beban biaya serta waktu bagi UMKM. Melalui PAR, terbentuk model kolaborasi yang lebih efektif dan berkelanjutan antara BUMDes, pemerintah desa, dan UMKM. Kesimpulannya, penguatan kapasitas BUMDes dan dukungan regulatif diperlukan agar BUMDes dapat berperan optimal dalam membangun ekosistem halal yang partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan UMKM.

1. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan keabsahan produk yang beredar di pasar nasional maupun internasional(Sunarta et al., 2025). Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, permintaan terhadap produk halal terus meningkat seiring dengan bertambahnya kesadaran konsumen muslim terhadap pentingnya aspek kehalalan dalam setiap produk makanan, minuman, dan barang konsumsi(Herianti et al., 2023). Hal ini menjadikan sertifikasi halal bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha (Noordin et al., 2014). Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) telah menegaskan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal, dengan masa penerapan penuh hingga Oktober 2024.

Meskipun regulasi tersebut dirancang untuk meningkatkan standar keamanan dan daya saing produk Indonesia, implementasinya di tingkat desa menunjukkan sejumlah tantangan yang signifikan (Hidayat et al., 2023). Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai sektor yang mendominasi rantai produksi pangan nasional, cenderung menghadapi hambatan dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal(Anggraeni, 2025). Di Desa Taman, berbagai kendala masih ditemukan, mulai dari rendahnya akses informasi mengenai alur sertifikasi, minimnya pendampingan teknis, terbatasnya literasi digital untuk menggunakan platform SiHalal, hingga anggapan bahwa proses sertifikasi halal memerlukan biaya besar dan waktu yang panjang. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar UMKM belum siap menghadapi tuntutan regulatif yang semakin ketat.

Di sisi lain, BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa berbasis masyarakat memiliki potensi yang sangat strategis untuk menjadi fasilitator dalam percepatan sertifikasi halal(Hasbi et al., 2025). Kedekatan struktural BUMDes dengan pemerintah desa dan pelaku UMKM menjadikannya aktor yang potensial dalam menjembatani kebutuhan administrasi, teknis, maupun informasi(Pawitan et al., 2025). Namun, orientasi BUMDes selama ini masih cenderung terbatas pada unit usaha tradisional seperti simpan pinjam atau pengelolaan aset desa(Rahayu et al., 2023). Rendahnya inovasi kelembagaan dan belum adanya model pendampingan halal yang terintegrasi menyebabkan peran BUMDes dalam mendukung sertifikasi halal belum optimal(Ubaidillah & Ningtyas, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan implementatif yang penting untuk ditelaah dan dikembangkan.



Gambar 1: Koordinasi dan analisis kebutuhan dengan Bumdes

Berangkat dari kondisi tersebut, program pengabdian ini memiliki fokus untuk menganalisis sekaligus memperkuat peran BUMDes dalam mendukung percepatan pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM Desa Taman. Secara khusus, pengabdian ini diarahkan untuk mengidentifikasi kontribusi BUMDes dalam penyediaan layanan informasi, fasilitasi administrasi, pendampingan teknis, serta penguatan koordinasi dengan lembaga sertifikasi halal. Selain itu, pengabdian ini juga memetakan berbagai hambatan kelembagaan yang dihadapi BUMDes, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman regulasi halal, serta lemahnya kolaborasi lintas lembaga.

Kebaruan pengabdian ini terletak pada pengembangan model pendampingan sertifikasi halal yang menempatkan BUMDes sebagai aktor utama dalam fasilitasi UMKM di tingkat desa, sebuah pendekatan yang selama ini belum banyak dikembangkan dalam program pemberdayaan masyarakat. Pengabdian ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan administratif,

tetapi memperkenalkan konsep halal service hub berbasis BUMDes, yaitu reposisi BUMDes dari lembaga ekonomi desa konvensional menjadi pusat layanan halal yang mampu memberikan edukasi regulatif, bimbingan teknis, serta pendampingan digital melalui platform SiHalal.

Kebaruan lainnya adalah penggunaan metode Participatory Action Research (PAR) yang mengintegrasikan UMKM, BUMDes, pemerintah desa, dan pendamping halal sebagai subjek aktif yang terlibat dalam seluruh tahapan kegiatan—mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Pendekatan partisipatif ini menghasilkan pemetaan kebutuhan yang lebih akurat sekaligus membangun kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan. Selain itu, pengabdian ini menawarkan formulasi strategi penguatan kelembagaan BUMDes yang dapat direplikasi di desa lain, sehingga berpotensi menjadi model implementatif dalam percepatan sertifikasi halal bagi UMKM di berbagai daerah. Dengan demikian, pengabdian ini memberikan kontribusi baru berupa integrasi kelembagaan, pendekatan partisipatif, dan rekayasa model pendampingan halal yang lebih sistematis dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

2. METODE

Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya pengelola BUMDes dan para pelaku UMKM, dalam keseluruhan proses kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan proses identifikasi masalah, pelaksanaan tindakan, hingga evaluasi secara partisipatif, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat(Nurdiyanah et al., 2016).

Pelaksanaan pengabdian diawali dengan kegiatan identifikasi dan pemetaan masalah secara kolaboratif melalui diskusi kelompok, wawancara mendalam, serta observasi partisipatif. Tahap ini bertujuan menggali secara komprehensif berbagai persoalan yang dihadapi BUMDes dan UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal, termasuk keterbatasan pengetahuan regulasi, hambatan teknis, serta kendala administratif yang sering muncul.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, tim pengabdi bersama mitra menyusun rencana tindakan yang relevan dan aplikatif. Rencana ini mencakup penyusunan strategi pendampingan sertifikasi halal, perumusan kebutuhan pelatihan, serta penentuan mekanisme layanan BUMDes dalam membantu UMKM menyiapkan dokumen yang diperlukan. Penyusunan rencana dilakukan

melalui musyawarah sehingga semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan tindakan, berupa pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dan penguatan kapasitas BUMDes. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi workshop pemahaman standar halal, bimbingan teknis pengisian sistem SiHalal, serta fasilitasi koordinasi antara UMKM, BUMDes, dan lembaga pendamping proses halal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara partisipatif agar BUMDes dan UMKM dapat berperan aktif dalam setiap proses.

Setelah tindakan dilaksanakan, dilakukan refleksi bersama dengan seluruh pihak yang terlibat. Refleksi ini bertujuan mengevaluasi keberhasilan kegiatan, mengidentifikasi hambatan yang tersisa, serta merumuskan perbaikan yang dibutuhkan untuk penyempurnaan strategi pendampingan. Proses refleksi menjadi momen penting untuk memastikan bahwa hasil pengabdian benar-benar relevan dan memberikan dampak nyata.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan perumusan rekomendasi yang dihasilkan dari seluruh rangkaian kegiatan PAR. Rekomendasi disusun sebagai dasar untuk penguatan peran BUMDes dalam mendukung percepatan sertifikasi halal pada masa mendatang, sekaligus menawarkan model pendampingan berkelanjutan bagi UMKM di Desa Taman.

Melalui pendekatan PAR ini, pengabdian tidak hanya menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika peran BUMDes dalam proses sertifikasi halal, tetapi juga mendorong lahirnya langkah-langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat desa.

3. HASIL

Pelaksanaan program pengabdian mengenai percepatan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Taman menghasilkan beberapa temuan penting terkait kondisi kelembagaan BUMDes, kesiapan pelaku usaha, serta efektivitas pendampingan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan diskusi partisipatif, diketahui bahwa BUMDes "Sumber Sejahtera Taman" memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang mampu menjembatani kebutuhan UMKM dalam proses pengurusan legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal. Meskipun BUMDes baru memperoleh legalitas formal pada tahun 2025, lembaga ini sebelumnya telah menjalankan sejumlah aktivitas ekonomi desa yang kemudian menjadi fondasi untuk memperkuat peran kelembagaannya.

Program pengabdian juga menemukan bahwa pemahaman UMKM terhadap urgensi sertifikasi halal masih sangat rendah. Mayoritas pelaku UMKM belum mengetahui alur pendaftaran, persyaratan dokumen, maupun pemanfaatan sistem SiHalal. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pengajuan sertifikasi, meskipun terdapat dukungan regulasi dari pemerintah. Melalui rangkaian kegiatan PAR, tim pengabdian bersama BUMDes berhasil memfasilitasi proses identifikasi kendala, menyusun rencana aksi, serta memberikan pendampingan teknis secara langsung kepada pelaku UMKM.

Salah satu hasil signifikan dari pengabdian ini adalah terselenggaranya kegiatan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal yang melibatkan 15 UMKM aktif di Desa Taman. Kegiatan ini mencakup penyuluhan mengenai standar halal, verifikasi bahan, tata cara produksi yang memenuhi kriteria halal, serta praktik langsung pengisian formulir melalui sistem SiHalal. Pelaku UMKM mendapatkan bimbingan tahap demi tahap sehingga mereka mampu mengakses dan menggunakan platform digital tersebut secara mandiri.



Gambar 2: Hasil Produk Bumdes

Di sisi kelembagaan, pengabdian ini mendorong peningkatan kapasitas BUMDes melalui pelatihan administrasi, penyusunan mekanisme layanan halal berbasis desa, serta pembentukan jalur komunikasi yang lebih sistematis antara BUMDes, pemerintah desa, dan lembaga sertifikasi halal. Melalui proses refleksi PAR, BUMDes menyadari perlunya reposisi peran kelembagaan agar tidak hanya fokus pada unit usaha tradisional, tetapi juga mengembangkan layanan pendampingan UMKM sebagai bagian dari strategi peningkatan ekonomi desa.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, terbangun komitmen bersama antara BUMDes, pemerintah desa, dan UMKM untuk melanjutkan proses sertifikasi hingga selesai dan menjadikannya sebagai program berkelanjutan. Pengabdian ini juga menghasilkan kesadaran kolektif bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi merupakan peluang strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Keseluruhan proses menunjukkan bahwa pendekatan PAR efektif dalam memperkuat kesiapan UMKM, membangun kapasitas

kelembagaan BUMDes, serta menciptakan model pendampingan halal yang lebih adaptif dan partisipatif di tingkat desa.

4. PEMBAHASAN

Kesiapan UMKM di Desa Taman dalam menghadapi proses sertifikasi halal pada awal pendampingan berada pada kategori rendah. Mayoritas pelaku UMKM belum memahami urgensi kepemilikan sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional sekaligus sebagai strategi peningkatan daya saing produk(Hk & Agusseptiany, 2025). Ketidaktahuan ini menyebabkan sebagian UMKM menganggap proses sertifikasi halal sebagai beban tambahan, bukan sebagai kebutuhan penting dalam pengembangan usaha. Selain itu, rendahnya kesadaran regulatif mengakibatkan UMKM tidak memiliki inisiatif untuk mengurus legalitas usaha secara mandiri.

Di lapangan ditemukan bahwa hampir semua UMKM belum mampu mengakses atau mengoperasikan platform SiHalal, yang merupakan sistem utama dalam pendaftaran sertifikasi halal. Rendahnya literasi digital membuat pelaku usaha kesulitan memahami alur pengisian formulir, pengunggahan dokumen, maupun verifikasi data yang diperlukan oleh BPJPH. Selain itu, beberapa pelaku UMKM belum memiliki dokumen dasar seperti NIB, PIRT, atau daftar bahan baku sehingga memperlambat proses pendaftaran. Ketergantungan terhadap bantuan eksternal juga terlihat cukup besar sehingga proses administrasi belum berjalan secara mandiri.

Melalui program pendampingan yang meliputi sosialisasi halal, pelatihan penggunaan SiHalal, dan verifikasi bahan baku, kesiapan UMKM mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Pelaku usaha mulai memahami alur sertifikasi, pentingnya bahan baku yang sesuai standar halal, serta urgensi legalitas usaha. Pada sesi praktik, peserta mampu mengikuti tahapan pengisian SiHalal dengan lebih percaya diri. Peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukasi dan praktik langsung sangat efektif dalam meningkatkan kesiapan UMKM untuk mengurus sertifikasi halal secara mandiri dan berkelanjutan.

BUMDes "Sumber Sejahtera Taman" pada awalnya masih berorientasi pada unit usaha tradisional seperti simpan pinjam dan pengelolaan aset desa. Fokus tersebut menyebabkan peran BUMDes dalam pendampingan UMKM belum terarah dan tidak menyentuh aspek peningkatan kapasitas pelaku usaha, termasuk terkait pemenuhan regulasi halal. Minimnya pengalaman dalam mendampingi UMKM menjadi salah satu faktor yang membuat BUMDes belum

memainkan peran optimal dalam mendukung percepatan sertifikasi halal. Kondisi ini memperlihatkan perlunya reposisi dan perluasan fungsi kelembagaan sesuai kebutuhan desa.

Melalui kegiatan pengabdian, BUMDes mulai menyadari potensi strategisnya sebagai fasilitator utama dalam membantu UMKM mengakses informasi, menyusun dokumen administrasi, dan memahami tahapan sertifikasi halal. Proses diskusi kelompok dan pemetaan kebutuhan melalui pendekatan PAR memperkuat komitmen BUMDes untuk mengambil bagian dalam pelayanan publik berbasis halal. BUMDes kemudian mulai merancang mekanisme layanan, termasuk pendataan UMKM, penyediaan layanan konsultasi halal, dan pendampingan administratif. Transformasi ini menunjukkan adanya perubahan orientasi BUMDes dari sekadar pengelola keuangan desa menjadi lembaga pendukung pengembangan usaha lokal.

Pengabdian ini juga menginisiasi lahirnya konsep halal service hub berbasis desa, di mana BUMDes bertindak sebagai pusat koordinasi antara UMKM, pemerintah desa, dan lembaga sertifikasi halal. Melalui pelatihan dan penyusunan alur pelayanan, BUMDes kini memiliki kerangka operasional untuk mendampingi UMKM secara berkelanjutan. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDes tetapi juga memperkuat ekosistem halal desa melalui sinergi program dan kemudahan akses layanan. Dengan demikian, BUMDes mulai memainkan peran baru yang lebih strategis dan berdampak langsung pada percepatan sertifikasi halal di Desa Taman.

Tabel 1: Hasi; dan Indikator keberhasilan Pengabdian

Aspek	Indikator	Kondisi Sebelum Pengabdian	Kondisi Setelah Pengabdian
Kesiapan UMKM	Pemahaman sertifikasi halal	Rendah, tidak mengetahui alur dan regulasi	Meningkat, mampu menjelaskan tahap sertifikasi
	Kesiapan dokumen usaha	Tidak lengkap (NIB/PIRT belum dimiliki)	Mulai melengkapi persyaratan administrasi
	Kemampuan menggunakan SiHalal	Hampir seluruh peserta belum mampu	80% peserta mampu mengoperasikan SiHalal
Peran BUMDes	Keterlibatan dalam pendampingan	Tidak ada layanan halal	BUMDes mulai menjalankan fungsi fasilitasi

	Koordinasi dengan pemdes & UMKM	Tidak terstruktur	Terbentuk alur koordinasi baru
Pelaksanaan PAR	Partisipasi UMKM & BUMDes	Pasif dan menunggu instruksi	Aktif dalam diskusi, rencana aksi, dan evaluasi
Dampak Kegiatan	Jumlah UMKM yang didampingi	Belum ada pendampingan	15 UMKM mendapat pendampingan langsung
	Peningkatan kapasitas BUMDes	Tidak memahami teknis halal	BUMDes memiliki rencana layanan halal desa

Tabel indikator hasil pengabdian menunjukkan perubahan yang signifikan pada berbagai aspek yang berkaitan dengan kesiapan UMKM, peran BUMDes, pelaksanaan metode PAR, dan dampak kegiatan secara keseluruhan. Pada aspek kesiapan UMKM, sebelum program dilaksanakan, pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal masih sangat rendah. Mereka belum mengetahui alur, persyaratan, maupun manfaat sertifikasi halal bagi pengembangan usaha. Kelengkapan dokumen usaha seperti NIB dan PIRT pun belum terpenuhi, serta hampir seluruh peserta tidak mampu mengoperasikan SiHalal. Setelah pendampingan dilakukan, terjadi peningkatan yang jelas: para pelaku UMKM mulai memahami tahapan sertifikasi halal, mulai melengkapi dokumen legalitas, dan bahkan sekitar 80% peserta sudah dapat menggunakan SiHalal secara mandiri.

5. Kesimpulan

Program pengabdian mengenai percepatan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Taman menunjukkan bahwa kolaborasi partisipatif melalui pendekatan PAR mampu meningkatkan kesiapan pelaku usaha sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan desa. UMKM yang sebelumnya memiliki pemahaman rendah tentang regulasi halal, minim dokumen legalitas, dan belum mampu menggunakan platform SiHalal, kini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan administratif. BUMDes “Sumber Sejahtera Taman” yang awalnya belum memiliki peran dalam pendampingan halal berhasil direpositori menjadi fasilitator utama melalui pembentukan layanan halal berbasis desa, koordinasi yang lebih terstruktur, serta pemahaman teknis yang lebih baik. Dampak program terlihat pada meningkatnya partisipasi UMKM dan BUMDes, terciptanya model

pendampingan yang lebih terarah, serta pendampingan langsung kepada 15 UMKM yang menjadi titik awal lahirnya ekosistem halal desa. Dengan demikian, pengabdian ini berkontribusi pada penguatan tata kelola lokal dan membuka peluang pengembangan model pendampingan halal yang dapat direplikasi di desa lain.

Refrensi

- Anggraeni, F. S. (2025). PENGEMBANGAN PRODUK HALAL SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN KINERJA UMKM DAN BISNIS WISATA. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 10(1), 26–45. <https://doi.org/10.34202/imanensi.10.1.2025.26-45>
- Hasbi, S., Syahlendra, R., Brawijaya, A., Aziz, I. A., Tsani, A. M., Amani, A., Hidayat, A. P., Malik, F. D. M., Khoirunisa, L., Najiallah, M., Putri, O. D., & Sormin, S. K. (2025). PENGUATAN POTENSI EDUWISATA HALAL DAN DAYA SAING PELAKU USAHA MIKRO DI DESA WATES JAYA MELALUI SERTIFIKASI HALAL. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), SNPPM2025EK-SNPPM2025EK.
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). INDUSTRI HALAL DARI PERSPEKTIF POTENSI DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 56–64. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>
- Hidayat, M. N. F., Febrianto, A., Mundir, A., Akil, A. I., Nisa', C., Amelia, L., Yanuar, R. A., & Nabila, U. (2023). PKM Pengembangan Desa Ekonomi Digital melalui Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Sertifikasi, Komersialisasi, dan Digitalisasi Produk Lokal Desa Clarak Kabupaten Probolinggo. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.33650/guyub.v4i3.6850>
- Hk, L. A., & Agusseptiany, T. Z. (2025). Membangun UMKM Pangan Halal Menuju Desa Berdaya dan Berdaya Saing. *Jurnal AbdiMU (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(2), 212–221. <https://doi.org/10.32627/abdimu.v5i2.1673>

- Noordin, N., Noor, N. L. M., & Samicho, Z. (2014). Strategic Approach to *Halal* Certification System: An Ecosystem Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 79–95. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1110>
- Nurdiyanah, N., Parmitasari, R. D. A., Mulyadi, I., Nur, S., & Haruna, N. (2016). *Panduan Pelatihan Dasar Asset Based Community-driven Development (ABCD)* (A. Rahman, Ed.). NUR KHAIRUNNISA. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17068/>
- Pawitan, G., Lesmono, D., Aritonang, K., & Diyanah, M. C. (2025). Empowering Rural Communities through Strengthening Village-Owned Enterprises (BUMDes) for Sustainable Socioeconomic Development: A Case Study of Mekarsari Village, Garut Regency. *Society*, 13(1), 256–274. <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.797>
- Rahayu, M. J., Mukaromah, H., & Mulyanto, M. (2023). Social capital-based strategy of sustainable village-owned enterprises (BUMDes) development. *International Journal of Social Economics*, 51(3), 297–312. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2022-0700>
- Sunarta, D. A., Bulqis, R., Bisyriani, A., Sudirman, M. S., & Apriliani, R. (2025). Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Pengembangan Industri Halal Indonesia. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 5(1), 71–82. <https://doi.org/10.31332/robust.v5i1.11569>
- Ubaidillah, M. H., & Ningtyas, M. A. (2025). KONTRIBUSI MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN INDUSTRI HALAL. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 4(1). <https://doi.org/10.35132/assyifa.v4i1.969>